

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Karakteristik Pemerintah Daerah

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, definisi kata “karakteristik” adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai arti Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Karakteristik pemerintah daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah daerah adalah ciri khas atau identitas dari suatu pemerintah daerah yang dapat membedakan dengan daerah lain.

Nugroho (2014) menyatakan bahwa “karakteristik daerah memiliki pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah dan membedakannya dengan daerah lain“. Suhardjanto (2011) mendefinisikan “karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat dengan daerah lain”. Anzarsari (2014) mengatakan bahwa “karakteristik pemerintah daerah adalah identitas yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota”. Sedangkan Sumarjo (2010) menyatakan bahwa “karakteristik pemerintah daerah adalah identitas yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain“. Perbedaan Karakteristik antar daerah diasumsikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah daerah adalah ciri khas atau identitas dari suatu pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Dalam penelitian ini menjelaskan,

karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan *Population*, Ukuran (*size*) pemerintah daerah diukur dengan total Aset, Tingkat kemakmuran (*wealth*) diukur dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan, dan *Intergovernmental revenue* diukur dari total dana perimbangan dibandingkan dengan total pendapatan. Berikut ini penjelasan dari masing- masing variabel:

2.1.2 Population

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk adalah orang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang menetap di Indonesia (www.bps.go.id). Data kependudukan merupakan salah satu data yang sudah menjadi tugas dari badan pusat statistik setiap daerah, provinsi dan negara untuk mendata serta mempublikasikan hasil data tersebut untuk keperluan konsumen baik bagi negara dan masyarakat. Data kependudukan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik berasal dari berbagai sumber seperti:

1. Sensus penduduk (SP)
2. Survey penduduk antar sensus (SUPAS)
3. Survey sosial ekonomi nasional (SUSENAS)
4. Registrasi penduduk pertengahan tahun.

Sensus penduduk berdasarkan peraturan pemerintah (No.6/1960; No.7/1960) Sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel. Pendekatan *de jure* dan *de facto* diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de jure*, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal; sedangkan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de facto* dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Survei penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih di wawancarai guna mendapatkan

informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas dan migrasi.

Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Sama dengan survei penduduk antar sensus, survei ini menghasilkan ukuran demografi, khususnya fertilitas, keluarga berencana dan mortalitas. Rumah tangga terpilih diwawancara untuk tujuan ini.

Registrasi penduduk data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambahkan satu catatan kedalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Aktivitas ini (dilakukan oleh kementerian dalam negeri) menggunakan pendekatan *de jure*.

2.1.3 Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah (*Size*) untuk mengetahui besar kecilnya objek dari pemerintah daerah tersebut. Mengetahui ukuran pemerintah daerah salah satunya dengan mengetahui total aset pemerintah daerah. Kerangka Konseptual dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengungkapkan dalam paragraph 65 ayat (a) :

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa.”

Ukuran (*Size*) pada instansi pemerintah dapat dilihat dari total aset, luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi pada umumnya peneliti menggunakan aset mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Maiyora (2015). Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa “Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu, kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja. “ *Size* yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi

dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangan. Maiyora (2015) menyatakan bahwa “Hal ini menyebabkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran pemerintah daerah yang kecil ukurannya. Sama halnya dengan pendapat Sumarjo (2010) menyatakan bahwa “Semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah, semakin besar pemerintah daerah maka semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan total aset sebagai ukuran (*size*) pemerintah daerah.

2.1.4 Tingkat Kemakmuran (*Wealth*) Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online*, kemakmuran adalah semua harta milik dan kekayaan potensi yang dimiliki negara untuk keperluan seluruh rakyat ; keadaan kehidupan negara yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhi kebutuhannya. Abdullah (2004) dalam Sumarjo (2010) menyatakan bahwa “Kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Pertimbangan pengukuran kemakmuran dengan PAD ini karena meskipun kecilnya kontribusi PAD terhadap pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Potensi asli daerah dan

pengelolaan sepenuhnya oleh daerah merupakan 2 (dua) unsur penting dari konsep PAD.

2.1.5 Intergovernmental Revenue

Desentralisasi fiskal terjadi aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahannya. *Intergovernmental revenue* adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. *revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto, 2011).

Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta
4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

2.1.6 Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga

keputusan yang diambil bias lebih berkualitas (Mardiasmo, 2018) ialah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Melihat besarnya manfaat dari laporan keuangan maka pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai kewajiban Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang dituangkan melalui Undang-Undang No. 17 tahun 2003. Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan keuangan setidaknya meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Lebih lanjut, dalam laporan realisasi anggaran setidaknya menyajikan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (PP RI No. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset *non*-keuangan, pembiayaan, dan *non*-anggaran (PP RI No. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Peranan pelaporan keuangan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 21 dan 22

(PP No. 24/2005) menyatakan bahwa:

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pernyataan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 1 Menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Keuangan dapat disajikan dalam laporan keuangan yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban. Tujuan laporan keuangan menurut SAP (Mardiasmo, 2018) sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi tentang posisi sumber daya ekonomi , dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan Informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.7 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan bahwa kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya (Wibowo, 2013).

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut :

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan di bidang penyelenggaraan pemerintah yang dapat di nilai dengan uang. Setiap organisasi berkeinginan mencapai tingkat kinerja tinggi. Untuk itu perlu mengetahui perkembangan pencapaian standar, target, dan waktu yang tersedia. Pengukuran perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, apakah terdapat kesenjangan kinerja, dan apakah hasil akhir diperkirakan dapat dicapai. Apabila tidak dapat mengukur, maka tidak dapat mengelola pelaksanaan kinerja yang dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja dapat dibagi menjadi dua yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan melakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah,

desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektifitas PAD, efisiensi dan efektifitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio kemampuan mengembalikan pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*), dan rasio utang terhadap belanja. Pengukuran kinerja non keuangan organisasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja.

Rasio-rasio sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah Mahmudi (2016) sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan bantuan/transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah\ i}{bantuan\ Pusat/Provinsi+Pinjaman\ i} \times 100\%$$

Berdasarkan rasio diatas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini karena hubungan karakteristik pemerintah daerah dan rasio kemandirian berkesinambungan dalam perhitungan kinerja keuangan pemerintah daerah dan tingkat kemandirian di kabupaten/kota Sumatera Selatan terkhusus tahun 2017 terjadi fluktuasi.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan ringkasan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulisan.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Darmanto (2012)	Pengaruh Population, Employment, Size Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Darmanto (2012)	Variabel Independen : 1. Population 2. Employment 3. <i>Size</i> 4. Leverage Variabel Dependen: Kinerja Keuangan daerah	1. Jumlah penduduk (<i>population</i>) dan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia 2. Variabel jumlah tenaga kerja (<i>employment</i>) dan ukuran (<i>size</i>) pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
2.	Desy Anzarsari (2014)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Se-Jawa tengah	Variabel Independen: 1. Kemakmuran (<i>wealth</i>) daerah 3. Ukuran (<i>size</i>) daerah 4. Ukuran Legislatif 5. <i>Intergovernmental revenue</i> Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. Kemakmuran (<i>wealth</i>) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2. Ukuran daerah dan Ukuran Legislatif atau dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 3. <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

3.	Hendro Sumarjo (2010)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Indonesia	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Daerah 2. Kemakmuran Daerah 3. Ukuran Legislatif 4. <i>Leverage</i> 5. <i>Intergovernmental revenue</i> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemakmuran (<i>wealth</i>) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2. Ukuran Legislatif atau dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 3. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 4. Ukuran (<i>size</i>) daerah pemerintah daerah yang diukur dengan total aktiva berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 5. <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4.	Gita Maiyora (2015)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Sumatera	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Daerah 2. Kemakmuran Daerah 3. Ukuran Legislatif 4. <i>Leverage</i> 5. <i>Intergovernmental revenue</i> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Size</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan . Hal ini berarti <i>size</i> merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan 2. <i>Wealth</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan 3. Ukuran Legislatif dan <i>Leverage</i> pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh signifikan

				4. <i>Intergovernmental Revenue</i> memiliki pengaruh yang signifikan
5.	Nandhya Marfiana , dan Lulus Kurniasih (2013)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan hasil pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa	Variabel Independen: 1. Ukuran Daerah 2. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat 3. Ukuran Legislatif 4. Temuan Audit Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. Ukuran Pemerintah daerah, Tingkat kekayaan daerah ; Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif 3. Ukuran Legislatif dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Peneliti telah memaparkan tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat kesamaan variabel yang digunakan peneliti dengan beberapa peneliti sebelumnya yaitu variabel karakteristik pemerintah daerah. Perbedaannya, peneliti menggunakan beberapa variabel dan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda. Peneliti akan melakukan penelitian pada 15 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

2.3 Kerangka Pemikiran

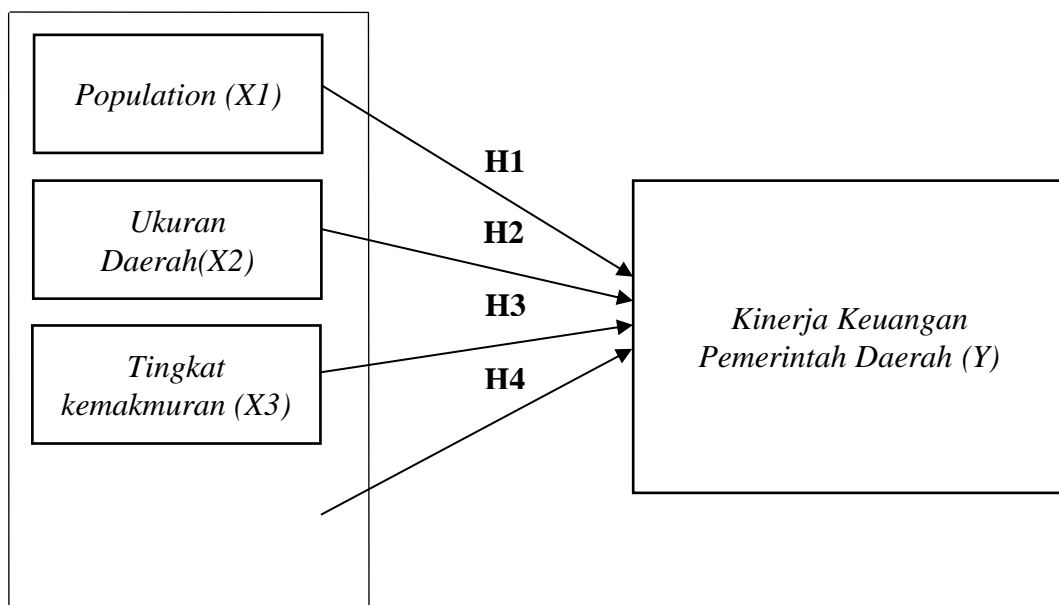
Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa, Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir ini

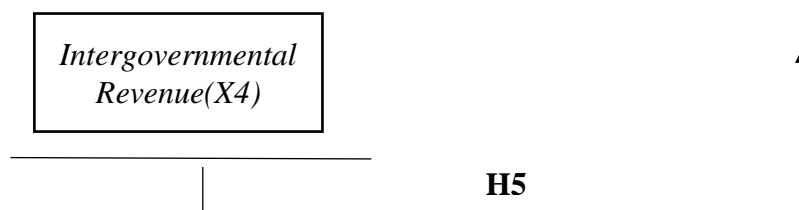
disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis premis.

Kerangka fikir yang baik , memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan.
2. Diskusi dalam kerangka berfikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan pertautan/hubungan antar variabel yang diteliti. Dan ada teori yang mendasari.
3. Diksusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif , berbentuk simetris, kausal dan interaktif
4. Kerangka berfikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram (paradigma penelitian). Sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir yang dikemukakan dalam penelitian.

Berdasarkan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh *Population*, Ukuran Daerah (*Size*), Tingkat Kemakmuran (*Wealth*) dan Intergovernmental Revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir pada gambar 2.1





Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu *Population*, Ukuran Daerah (*size*), Tingkat Kemakmuran(*wealth*) dan *Intergovernmental Revenue* mempengaruhi variabel dependen yaitu Kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Y) baik secara simultan maupun parsial.

2.4 Hipotesis Penelitian

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris”. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah Karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari *Population*, ukuran (*size*) pemerintah daerah, tingkat kemakmuran (*wealth*), dan *intergovernmental revenue* . Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh *Population* Pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Population adalah jumlah keseluruhan penduduk yang berada pada Kabupaten/ kota. Salah satu indicator yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik adalah pemerintah daerah yang memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Jumlah populasi penduduk yang menempati daerah juga berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik lebih baik dari sebelumnya.

Coben (2006) mengidentifikasi bahwa kepadatan penduduk terkait dengan kinerja pemerintah daerah. Peningkatan jumlah penduduk pada suatu daerah menyebabkan daerah yang bersangkutan mendapatkan tuntutan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada public. Penelitian yang dilakukan Coben (2006) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Darmanto (2012) yang menyatakan bahwa *Population* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena jumlah penduduk sebuah daerah akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₁ : *Population* berpengaruh signifikan terhadap efisiensi Kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

2.4.2 Pengaruh Ukuran (*size*) Pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Size yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset yang besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangannya. Sumarjo (2010) menyatakan bahwa “semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut”. Sama halnya dengan pendapat Maiyora (2015) menyatakan bahwa “Hal ini menyebabkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset yang besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya “.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₂ : Ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap efisiensi Kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

2.4.3 Tingkat Kemakmuran (*Wealth*) Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Sumarjo (2010) menyatakan bahwa “kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan asli daerah yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa “Peningkatan PAD merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut “.

Uraian di atas mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anzarsari,2014) bahwa kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian Mustikarani dan Fitriyani (2012) yang menemukan bahwa pendapatan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan Juga Nadya Marisa (2018) menyatakan bahwa Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₃ : Tingkat Kemakmuran (*Wealth*) Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

2.4.4. *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

Intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick, 2007). Intergovernmental revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto et al., 2010). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Anzarsari (2014), Marfiana dan Kurniasih (2013), Maiyora (2015) dan Sumarjo (2010) yang menyimpulkan bahwa Intergovernmental Revenue berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : Intergovernmental Revenue berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

2.4.5 *Population*, Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah , Tingkat Kemakmuran (*Wealth*) , dan *Intergovernmental Revenue* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari *Population*, Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah, Tingkat Kemakmuran (*Wealth*), dan *Intergovernmental Revenue*. Ukuran (*Size*) Pemerintah daerah diukur dari total aset. Sumarjo (2010) menyatakan bahwa “semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut”. Tingkat Kemakmuran (*Wealth*) Pemerintah daerah diukur menggunakan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total Pendapatan. Sedangkan *Intergovernmental Revenue* diukur menggunakan total dana perimbangan dibandingkan dengan total

pendapatan. Sesotyaningtyas (2012) menyatakan bahwa “Dengan adanya dana suntikan dari pemerintah pusat, diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintah di tingkat daerah. Berdasarkan uraian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Maiyora (2015) dan Sumarjo (2010) yang menyimpulkan bahwa secara simultan *Population, Size, Wealth* dan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H₅ : *Population, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Tingkat Kemakmuran (Wealth) dan Intergovernmental Revenue* secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.